

ABSTRAK

PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh:
Irene Nadia Vaniarinanta**

Dalam perkembangannya beberapa pelaku UMKM mengalami masalah hukum seperti sulit dalam mengurus perizinan berusaha, mendapatkan sertifikat halal, masalah kontrak/perjanjian, sengketa tenaga kerja, perpajakan, hingga tindak pidana seperti penggelapan dana. Pemerintah mengeluarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana faktor pendukung serta penghambat dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data meliputi editing, klasifikasi data, penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung belum melaksanakan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung yang sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2) Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari pemerintah, adanya lembaga-lembaga bantuan hukum dan faktor penghambatnya adalah peraturan pemerintah yang belum terkoordinasi dengan baik, belum adanya kerjasama antara lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dengan pemerintah, dan informasi tentang lembaga bantuan hukum yang masih terbatas.

Kata Kunci: Bantuan, Pendampingan, Hukum, UMKM

ABSTRACT

PROVISION OF LEGAL ASSISTANCE AND ASSISTANCE SERVICES FORMICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

By

IRENE NADIA VANIARINANTA

*In its development, several MSMEs experienced legal problems such as difficulties in obtaining business licensing, obtaining halal certificates, contract/agreement issues, labor disputes, taxation, to criminal acts such as embezzlement of funds. The government issued PP No. 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises which in one of its articles regulates the provision of legal aid and assistance services for MSMEs. The formulation of the problem in this study is (1) How is the provision of legal assistance and assistance services for MSMEs in the city of Bandar Lampung?
(2) What are the supporting and inhibiting factors in the provision of legal aid and assistance services for MSMEs?*

This study uses empirical normative juridical research. Data collection is done by literature study and field study. Data processing includes editing, data classification, and data compilation. Data analysis used descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that (1) the local government, namely the Cooperative and UKM Service Office of Bandar Lampung City, has not implemented the provision of legal assistance and assistance services for MSMEs in Bandar Lampung City by PP No. 7 of 2021 concerning Ease of Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (2) The supporting factors are the existence of support from the government, the existence of legal aid institutions and the inhibiting factors are government regulations that have not been well coordinated, lack of cooperation between legal aid agencies and the government, and limited information about legal aid institutions.

Keywords: Legal Assistance, Assistance Service, UMKM